

## REKONSTRUKSI BUDAYA DAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PEDESAAN

Oleh :

Agung Adi<sup>1)</sup>, Ni Nyoman Rahmawati<sup>2)</sup>, Ervantia Restulita L. Sigai<sup>3)</sup>, Winawati<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

<sup>1</sup>email: agungadi@iahntp.ac.id

<sup>2</sup>email: ninyomanrahmawati@iahntp.ac.id

<sup>3</sup>email: ervantiarestulitai@iahntp.ac.id

<sup>4</sup>email: winawati@iahntp.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 6 Agustus 2025

Revisi, 16 Agustus 2025

Diterima, 7 September 2025

Publish, 15 September 2025

#### Kata Kunci :

Kemiskinan,

Rekonstruksi Budaya,

Modal Sosial,

Relokasi Masyarakat.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran rekonstruksi budaya dan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, dengan fokus pada masyarakat pasca relokasi pemukiman di Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Keunikan studi ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya melihat kemiskinan dari dimensi struktural, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai budaya dan jaringan sosial direkonstruksi secara aktif oleh warga sebagai respons terhadap perubahan spasial dan sosial. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana transformasi nilai, praktik sosial, dan partisipasi kolektif berkontribusi terhadap proses keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemiskinan bersifat multidimensi dan terkait erat dengan keterisolasian geografis serta ketimpangan akses; (2) rekonstruksi budaya, termasuk transformasi ritual adat dan perubahan peran Perempuan, mampu menciptakan ruang sosial baru yang lebih inklusif; dan (3) modal sosial dalam bentuk gotong royong, kepercayaan, dan solidaritas lintas agama menjadi fondasi pembangunan sosial pasca relokasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi kemiskinan dan pembangunan berbasis masyarakat, dengan menawarkan model integratif antara pendekatan struktural dan kultural. Selain itu, menegaskan bahwa reproduksi identitas sosial tidak bersifat statis, tetapi dinegosiasikan melalui krisis, adaptasi, dan partisipasi kolektif. Dengan demikian, kajian ini juga mendorong perumusan ulang kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada kekuatan sosial-budaya masyarakat lokal.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Agung Adi

Afiliasi: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Email: agungadi@iahntp.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia merupakan masalah emergency dan sistemis yang tidak dapat dilepaskan dari relasi antara faktor struktural seperti minimnya infrastruktur, akses pendidikan, dan kesehatan, serta faktor kultural seperti nilai, praktik sosial, dan struktur masyarakat (Dercon, 2009; Meert, 2000; Murdiyana & Mulyana,

2017). Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, merupakan contoh dari kemiskinan struktural yang ada, lokasi desa yang terisolasi secara geografis, hanya bergantung pada transportasi sungai, serta peristiwa banjir tahunan yang mengganggu produktivitas masyarakat (Rahmawati et al., 2024).

Sebelum dilakukan relokasi tahun 2015, masyarakat hidup dalam ketergantungan terhadap alam (hasil hutan dan sungai), dengan sistem pertanian tradisional dan pemenuhan pangan yang minim. Situasi demikian berdampak timbulnya kemiskinan yang bersifat multidimensi yakni rendah pendapatan, jauh bahkan terputus dari akses layanan publik, dan lemah secara modal produksi (Hardinandar, 2019; Hari, 2017). Namun, relokasi yang dilakukan berjauhan dengan bantaran sungai dan berdekatan dengan jalan poros kabupaten telah membawa perubahan besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan kini muncul semacam tren baru berupa keterlibatan perempuan dalam aktivitas produktif, misalnya kelompok-kelompok produksi batak dan penggalian pasir untuk material bangunan. Selain itu kegiatan lain yang menunjukkan menguatnya solidaritas lintas agama serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Keberhasilan relokasi di Desa Lawang kajang bukan hanya soal bangunan rumah atau infrastruktur fisik, tetapi sangat tergantung pada rekonstruksi budaya (keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa) dan penguatan modal sosial sebagai daya dukung utama (kerjasama lintas agama dan partisipasi masyarakat). Dengan kata lain, pencarian jalan alternatif terhadap penanggulangan kemiskinan tidak cukup bersifat struktural, tetapi juga menyentuh transformasi nilai (modal budaya) dan jaringan sosial (modal sosial).

Kendatipun telah terdapat studi terdahulu yang membahas penanggulangan atau pengentasan kemiskinan. Misalnya, Edwin et al. (2019) yang membahas peran relokasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Laga Priseptian et al. (2022) menelaah determinan ekonomi makro terhadap kemiskinan, sedangkan Murdiyana & Mulyana (2017) fokus pada efektivitas kebijakan negara dalam strategi pengentasan kemiskinan nasional. Tetapi, kajian tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana masyarakat pedesaan secara partisipasi dan kultural merekonstruksi nilai-nilai lokalnya dan memanfaatkan modal sosial dalam menghadapi relokasi dan perubahan ekonomi. Selain itu, sedikit kajian yang secara eksplisit mengulas relasi antara rekonstruksi budaya dan modal sosial dalam strategi pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Kalimantan dengan kekhasan adat, sistem kepercayaan, dan pluralitas agama. Untuk itu, penelitian ini bermanfaat sebagai bagian dari kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut.

Tujuan penelitian adalah menganalisis peran rekonstruksi budaya dan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan dengan menjelaskan bentuk-bentuk rekonstruksi budaya dalam kehidupan masyarakat Desa Lawang Kajang yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, dan menganalisis bentuk dan fungsi modal sosial masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi dan sosial pasca relokasi.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa rekonstruksi budaya lokal, seperti revitalisasi ritual, redefinisi peran perempuan, dan pembaruan nilai produktivitas dapat berkontribusi langsung terhadap perubahan sosial dalam masyarakat miskin. Selain itu, modal sosial berupa jaringan gotong royong, kepercayaan lintas agama, dan solidaritas masyarakat sebagai mekanisme kohesi dan integrasi sosial yang memperkuat efektivitas program struktural pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif di Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena mengalami perubahan signifikan pasca-relokasi, serta memiliki kompleksitas budaya Dayak dan pluralitas agama yang relevan dalam mengkaji rekonstruksi nilai sosial dan strategi pengentasan kemiskinan. Informan dipilih secara purposif untuk merepresentasikan keragaman perspektif, termasuk tokoh adat, tokoh agama, perempuan pelaku ekonomi rumah tangga, guru, dan aparat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif dalam kegiatan masyarakat, wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk mengelaborasi dan menguji pandangan kolektif.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tiga tahap (Sugiyono, 2012): reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola sosial yang ditemukan. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber, konfirmasi hasil (*member checking*) kepada informan, serta diskusi reflektif (*peer debriefing*) bersama tokoh lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana masyarakat desa membangun kembali nilai, jaringan sosial, dan solidaritas sebagai strategi menghadapi dan keluar dari kemiskinan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Kondisi Kemiskinan Sebelum Relokasi



Gambar 1. Pemukiman sebelum dilakukan relokasi  
Sebelum relokasi, masyarakat Desa Lawang Kajang hidup dalam kondisi kemiskinan. Pemukiman yang terisolasi, ketergantungan pada hasil hutan, dan

seringnya bencana banjir memperparah keadaan. Di sisi lain, akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas. Menurut penuturan sekretaris Desa Lawang Kajang (JP) ketika banjir banjir, semua rumah terendam. Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas, bahkan anak-anak tidak bisa sekolah. Selain itu, ketika warga masyarakat akan berobat harus naik *kelotok* (perahu kecil atau jukung) ke lokasi puskesmas (wawancara, 4 agustus 2024).

Merujuk pada wawancara dengan bapak SP tersebut, kondisi yang terjadi sebelum relokasi memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga kerentanan ekologis dan keterisolasian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga pola tiga pola yang menunjukkan karakteristik kemiskinan di Lawang kajang yang meliputi, (1) kemiskinan bersifat multidimensi, (2) bergantung pada ekosistem yang tidak stabil, (3) keterbatasan akses memperparah eksklusi sosial.

#### **Perubahan Pasca relokasi**

Setelah relokasi ke wilayah yang lebih tinggi dan strategis, warga mulai memiliki rumah layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta akses transportasi. Relokasi membawa perubahan nyata dalam kehidupan sosial. Kenyataan ini disampaikan oleh sekretaris BPD (S) yang berpendapat “dulu rumah dari papan dan sering roboh. Sekarang sudah pakai beton, punya WC, anak-anak sekolahnya tinggal jalan kaki.” (wawancara, 4 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa transformasi fisik desa memicu perbaikan dalam banyak aspek kesejahteraan dasar. Terlihat pola bahwa: (1) intervensi struktural memperbaiki kualitas hidup, (2) infrastruktur memfasilitasi mobilitas sosial, (3) relokasi menjadi titik balik perubahan sosial.

#### **Perubahan Peran Ekonomi dalam Keluarga**

Perubahan dalam aspek ekonomi keluarga paling nampak adalah peningkatan keterlibatan ibu rumah tangga yang sebelumnya berperan di ranah domestik kini mulai ikut serta dalam kegiatan produktif. Misalnya adanya keterlibatan dalam produksi batako, warung rumahan, dan penjualan hasil kebun menjadi pilihan usaha. Fenomena ini di tegaskan oleh salah satu ibu rumah tangga (NF) yang menyatakan sebelum relokasi tidak mungkin dilakukan karena jauh dari akses pasar.

Penjelasan NF menandakan relokasi tidak hanya mengubah ruang fisik, tetapi juga membuka ruang baru bagi partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pola yang muncul pasca relokasi yaitu, (1) pergeseran peran gender dalam ekonomi rumah tangga, (2) munculnya ekonomi lokal berbasis masyarakat, (3) kemiskinan mulai diatasi lewat pemberdayaan mikro.

#### **Rekonstruksi Budaya: Transformasi ritual adat, pergeseran nilai peran gender, dan pendidikan sebagai ruang transmisi nilai baru**

Upaya rekonstruksi budaya berdasar hasil penelusuran di lokasi penelitian menunjukkan adanya

strategi transformasi ritual tradisional. Misalnya pada ritual *pakanan sahur lewu* yang dulunya eksklusif adat kini menjadi acara bersama lintas umat. Warga muslim dan Kristen ikut berpartisipasi sebagai bentuk solidaritas. Dalam ritual ini semua umat beragama, baik Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan saling mendukung serta melaksanakan doa bersama. Untuk memperoleh perlindungan dari penguasa desa lawang kajang (wawancara, JP, AS, NF, dan AS, 6 agustus 2024).

Berdasarkan hasil data wawancara, ritual lokal mengalami perluasan makna menjadi simbol harmoni sosial dan spiritualitas kolektif. Rekonstruksi pada aspek budaya, khususnya ritual menunjukkan pola kecenderungan yang menjelaskan: (1) budaya direkonstruksi menjadi inklusif, (2) ritual sebagai ruang dialog sosial, (3) rekonstruksi budaya memperkuat identitas masyarakat baru. Dari tiga pola ini menunjukkan bahwa modal budaya menjadi aspek penting dalam mendukung solidaritas sebagai salah satu aspek yang berdampak pada upaya bersama dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, rekonstruksi budaya juga ditunjukkan dari wawancara dan observasi yang mengindikasikan adanya transformasi struktural dalam pembagian peran berbasis gender di desa, yang merefleksikan pergeseran paradigma dari domestikasi perempuan menuju partisipasi publik yang lebih luas. Perempuan yang sebelumnya terbatas pada peran domestik dan fungsi pendukung dalam ritual keagamaan, kini memposisikan diri sebagai aktor utama dalam ekonomi desa dan pengambilan keputusan komunitas. Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber (JP, SF, dan S) yaitu, “kami sekarang ikut rapat desa, punya kelompok kerja sendiri. Kami juga yang kelola uang dari usaha” (wawancara, 6 Agustus 2024).

Data hasil penelitian menunjukkan adanya perluasan *agen* perempuan dalam ranah publik. Dinamika ini dapat dipahami melalui tiga pola utama. Pertama, pelebaran ruang sosial perempuan, yang menandai transisi dari keterkungkungan domestik menuju keterlibatan aktif dalam forum publik. Kedua, pergeseran nilai produktivitas, di mana kontribusi ekonomi dan manajerial perempuan mulai menggantikan dominasi peran domestik sebagai tolok ukur keberdayaan. Ketiga, rekonstruksi budaya, yang memfasilitasi terbentuknya relasi gender yang lebih egaliter, sesuai dengan perspektif teori gender yang memandang kesetaraan sebagai hasil interaksi antara agen sosial dan struktur budaya. Pergeseran ini tidak hanya memperluas ruang partisipasi perempuan, tetapi juga merekonstruksi tatanan sosial desa menuju model relasi gender yang lebih setara.

Hasil dari data penelitian juga menunjukkan bahwa relokasi telah membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, yang secara signifikan memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap masa depan mereka. Perubahan ini terlihat jelas pada meningkatnya dorongan bagi anak perempuan untuk

menempuh pendidikan setinggi mungkin, sebagaimana diungkapkan oleh narasumber (JP dan NF), “kami ingin anak-anak, termasuk anak perempuan, bisa sekolah tinggi supaya tidak kembali ke kehidupan yang lama” (wawancara, 6 Agustus 2024). Pendidikan dalam konteks ini berfungsi sebagai kanal utama transformasi nilai dan mobilitas sosial, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam rekonstruksi budaya yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Teridentifikasi tiga pola utama yang mengiringi perubahan tersebut. Pertama, pendidikan sebagai instrumen rekonstruksi budaya, yang memungkinkan terjadinya pergeseran nilai dan perilaku menuju pola pikir yang lebih terbuka. Kedua, penanaman nilai kesetaraan gender, di mana kesempatan belajar yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan mulai menjadi norma baru. Ketiga, sekolah sebagai ruang reproduksi nilai modern, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan etos kerja, pola pikir kritis, dan aspirasi hidup yang lebih progresif di kalangan generasi muda.

#### **Gotong Royong: Modal Sosial kerjasama lintas agama**

Pascarelokasi, budaya gotong royong tidak hanya bertahan, tetapi justru menguat sebagai fondasi sosial masyarakat. Kerja kolektif dilakukan untuk membangun rumah, jalan, dan fasilitas umum, melibatkan seluruh warga tanpa memandang agama maupun suku, sebagaimana ditegaskan oleh salah satu narasumber (JP, sekretaris desa), “kalau ada pembangunan, semua warga terlibat. Tidak peduli agama atau dari suku mana” (wawancara, 6 Agustus 2024).



Gambar 2. Gotong royong pengecoran jalan

Modal sosial berbentuk kerja kolektif ini menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan lokal, yang ditandai oleh tiga kecenderungan utama: gotong royong sebagai sumber daya sosial, semangat kolektif yang melampaui batas identitas, dan modal sosial yang mempercepat proses pembangunan.

Sejalan dengan itu, tingkat kepercayaan sosial terhadap pemimpin lokal, baik perangkat desa maupun tokoh adat, juga terbilang tinggi. Kepercayaan sosial ini menciptakan pola di mana pemimpin lokal menjadi titik simpul jaringan sosial, legitimasi sosial memperkuat efektivitas kebijakan, dan hubungan antara struktur formal dan informal bersinergi untuk kepentingan bersama. Selain itu,

modal sosial yang terbangun bersifat lintas agama, terlihat dari saling membantu dalam perayaan keagamaan maupun kegiatan sosial. Warga dari berbagai agama membangun keakraban yang melampaui sekadar toleransi menuju relasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antaragama di desa bersifat kooperatif, solidaritas tumbuh dari pengalaman kolektif, dan pluralisme telah menjadi modal sosial yang terlembagakan dalam kehidupan komunitas.

#### **Pembahasan**

##### **Kemiskinan sebagai Disfungsi Struktural dan Kultural**

Temuan tentang kemiskinan di Desa Lawang Kajang memperlihatkan bahwa kondisi ini bukan sekadar akibat dari rendahnya pendapatan atau kurangnya fasilitas, melainkan cerminan dari disfungsi sistemis dalam struktur sosial dan geografis. Disfungsi struktural merujuk pada masalah dalam sistem dan struktur sosial yang menghalangi individual tahu kelompok untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan, kemiskinan kultural mengacu pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat yang cenderung melanggengkan kemiskinan, seperti kurangnya motivasi atau keengganan untuk berubah (Rosana, 2019). Seperti dijelaskan oleh Hardinandar (2019), kemiskinan di pedesaan kerap disebabkan oleh ke terputusan dari pusat layanan publik dan kebijakan pembangunan.

Ketika struktur ekonomi-politik gagal menyediakan akses dasar, masyarakat terjebak dalam ketergantungan ekologis dan reproduksi kemiskinan antar-generasi. Karena struktur dasar (underlying structure) berupa marginalisasi geografis, eksklusif pelayanan publik, serta ketimpangan distribusi sumber daya telah berlangsung lama tanpa intervensi holistik. Maka, intervensi struktural seperti relokasi menjadi penting, namun tidak cukup jika tidak disertai pendekatan kultural dan sosial.

##### **Relokasi dan Rekonstruksi Budaya: Fungsi Inklusif dan Adaptif**

Proses relokasi membuka ruang untuk rekonstruksi budaya, di mana nilai, ritus, dan peran sosial mengalami redefinisi sesuai konteks baru. Misalnya, ritual pakanan sahur lewu yang sebelumnya terbatas dalam lingkup adat Kaharingan kini menjadi arena spiritual kolektif warga lintas agama. Dalam kerangka Giddens (2003) dan Sztompka (2004), ini menunjukkan bahwa budaya berfungsi secara adaptif dan integratif, menyatukan identitas dalam ruang sosial baru. Praktik rekonstruksi budaya menciptakan landasan simbolik untuk integrasi sosial dan partisipasi kolektif. Karena kebutuhan untuk bertahan dan beradaptasi dengan realitas pasca relokasi mendorong masyarakat untuk memperbarui makna budaya menjadi instrumen harmoni dan resistensi terhadap disintegrasi.

##### **Modal Sosial sebagai Infrastruktur Sosial yang Fungsional**

Modal sosial yang kuat di desa ini berfungsi sebagai infrastruktur sosial dalam pembangunan pascarelokasi. Modal sosial yang paling menonjol adalah gotong royong. Gotong royong menjadi pranata untuk mengerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dan merupakan *shared poverty* untuk menyatakan “kebersamaan” (Geertz, 1979). *Sahred poverty* menunjukkan kuatnya “komunalisme” dalam masyarakat yang membagi rata beban kebutuhan. Kebersamaan menunjukkan adanya rasa persaudaraan dan saling mendukung antar anggota masyarakat. Nilai gotong royong melekat aspek modal sosial, adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama (Effendi, 2013). Gotong royong dapat dikembangkan untuk mobilisasi tenaga kerja dalam menggalang pemupukkan modal untuk pembangunan (Abdullah, 2002).

Gotong royong lintas agama, kepercayaan terhadap aparat lokal, dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi mencerminkan keberadaan bonding dan bridging social (Putnam, 1995). Fungsi modal sosial adalah menjembatani kekurangan modal fisik dan keuangan, menjadi pelumas sosial dalam pembangunan. Karena dalam konteks pedesaan dengan sumber daya terbatas, jaringan sosial menjadi substitusi dan bahkan katalisator pembangunan. Struktur informal (jaringan, kepercayaan, relasi) menggantikan fungsi-fungsi negara yang belum optimal.

Meskipun modal sosial berperan besar dalam penanggulangan kemiskinan, ia juga memiliki potensi disfungsi jika tidak dikelola dengan adil dan inklusif. Jika solidaritas hanya terbatas pada kelompok dominan atau elite lokal, maka akan muncul eksklusif sosial baru. Coleman (Siisiäinen, 2000) mengingatkan bahwa modal sosial bisa bersifat eksklusif dan menghambat mobilitas kelompok rentan jika terlalu terikat dalam jaringan homogen. Modal sosial dapat menjadi alat pembatas jika tidak dikembangkan dalam kerangka partisipatif dan reflektif. Karena struktur kuasa dalam masyarakat juga mempengaruhi distribusi akses terhadap informasi, sumber daya, dan partisipasi pengambilan keputusan.

#### **Pendidikan sebagai Agen Rekonstruksi Nilai dan Pelampauan Kemiskinan**

Pendidikan menjadi ruang penting dalam menginternalisasi nilai-nilai baru pascarelokasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan di Desa Lawang Kajang. Transformasi nilai terhadap pentingnya sekolah dan partisipasi perempuan menjadi kunci dalam melampaui kemiskinan. Dalam perspektif Talcott Parsons (Ritzer, 2012, 2013; Ritzer & Goodman, 2004), pendidikan memiliki fungsi pelestarian pola (*pattern maintenance*) dan integrasi dalam sistem sosial. Pendidikan memperkuat proses rekonstruksi budaya dan membuka ruang mobilitas sosial. Karena struktur pendidikan menjadi saluran utama transmisi nilai dan transformasi aspirasi dalam

masyarakat yang sedang membangun kembali identitasnya.

#### **Integrasi antara Struktur dan Budaya sebagai Kunci Transformasi**

Temuan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa ditangani dengan pendekatan tunggal. Perubahan nyata di Lawang Kajang terjadi karena integrasi antara struktur (relokasi, pembangunan fasilitas) dan budaya (rekonstruksi nilai, solidaritas sosial). Dalam pendekatan AGIL Parsons, adaptasi (A) dilakukan lewat perubahan tempat tinggal, pencapaian tujuan (G) melalui program ekonomi warga, integrasi (I) melalui ritual dan gotong royong, dan pelestarian pola (L) lewat pendidikan dan regenerasi nilai. Hanya pendekatan holistik yang mampu mengubah sistem sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Karena struktur sosial dan kultural tidak berjalan terpisah, tetapi saling menopang dalam membentuk ketahanan masyarakat terhadap kemiskinan dan perubahan sosial.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, selanjutnya ada tiga hal penting yang menjadi benang merah dari dinamika pengentasan kemiskinan di Desa Lawang Kajang. Pertama, bahwa kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari struktur dan ketimpangan spasial, yang secara historis menempatkan desa dalam kondisi terisolasi dan rentan secara ekologis. Kedua, rekonstruksi budaya lokal seperti transformasi ritual dan perubahan nilai-nilai gender memberikan ruang baru bagi integrasi sosial dan partisipasi ekonomi warga. Ketiga, modal sosial terbukti menjadi fondasi kolektif dalam mendukung pembangunan dan menciptakan solidaritas lintas agama, gender, dan etnis. Ketiga temuan ini membentuk konfigurasi sosial baru yang memperlihatkan ketahanan dan fleksibilitas masyarakat dalam menghadapi perubahan struktural pascarelokasi.

Temuan yang ditunjukkan dalam hasil penelitian merefleksikan bahwa masalah kemiskinan bukan sekadar soal ekonomi, melainkan merupakan produk dari relasi kuasa, eksklusif spasial, dan marginalisasi sosial yang bersifat sistemik. Struktur sosial dan kultural masyarakat sebelumnya mereproduksi keterbatasan peran perempuan, pandangan fatalistik terhadap nasib, serta keterasingan terhadap program pembangunan. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya statis. Warga menunjukkan kemampuan reflektif dan agen perubahan, terutama ketika relokasi menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan reinterpretasi nilai, ritus, dan peran sosial. Relokasi bukan hanya perubahan geografis, tetapi sekaligus transformasi relasi sosial yang memungkinkan masyarakat merumuskan ulang cara hidup, kerja, dan keberagaman secara lebih adaptif.

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa reproduksi identitas masyarakat terjadi melalui proses rekonstruksi budaya dan mobilisasi modal sosial. Identitas Dayak Kaharingan, misalnya,

tidak lagi direpresentasikan secara eksklusif melalui praktik adat tradisional, melainkan melalui bentuk-bentuk baru yang lebih plural, kolaboratif, dan inklusif. Solidaritas antar agama dalam ritual pakanan sahur lewu memperlihatkan bahwa identitas sosial dibentuk bukan semata oleh warisan, tetapi juga oleh pengalaman kolektif dan adaptasi terhadap konteks baru. Ini sejalan dengan konsep identitas sebagai konstruksi sosial yang selalu dinegosiasikan (Hall, 1991, 1996). Identitas masyarakat Lawang Kajang pasca relokasi adalah hasil dari proses reproduksi nilai-nilai lokal yang digabungkan dengan semangat keterbukaan dan partisipasi dalam pembangunan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti Edwin et al (2019) yang menekankan efektivitas relokasi dari sisi peningkatan ekonomi dan infrastruktur, atau Ubur (2011) yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam hal: (1) Menggabungkan dimensi rekonstruksi budaya dengan pendekatan pembangunan partisipatif, (2) Menunjukkan peran aktif perempuan sebagai pelaku transformasi pascarelokasi, dan (3) Menempatkan modal sosial lintas agama sebagai fondasi keberlanjutan sosial pasca-intervensi struktural. Penelitian ini tidak hanya memotret perubahan sosial, tetapi juga menjelaskan mekanisme reproduksi sosial melalui simbol, jaringan sosial, dan nilai masyarakat yang selama ini kurang dibahas dalam studi pembangunan pedesaan di Kalimantan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tiga tindak lanjut yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dalam merumuskan ulang strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan berbasis masyarakat:

1. Redefinisi Kemiskinan secara Kontekstual: Pemerintah daerah dan nasional perlu melakukan redefinisi kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada data kuantitatif ekonomi, tetapi mempertimbangkan dimensi budaya, spasial, dan relasi sosial lokal sebagai indikator kemiskinan.
2. Integrasi Modal Sosial dan Rekonstruksi Budaya ke dalam Desain Program: Program-program relokasi, pembangunan desa, atau pemberdayaan harus mulai menjadikan modal sosial dan tradisi lokal sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar latar belakang budaya yang diabaikan.
3. Penguatan Peran Perempuan dan Lintas Agama dalam Pembangunan: Pemerintah dan lembaga pembangunan harus memberikan ruang kelembagaan dan insentif bagi perempuan dan kelompok lintas agama yang berperan aktif dalam masyarakat, karena mereka adalah penggerak utama dalam proses rekonstruksi sosial.

Ketiga hal ini berkontribusi pada upaya mendefinisikan ulang pembangunan pedesaan secara lebih komprehensif, dengan mengakui bahwa ketahanan masyarakat dibentuk oleh interaksi antara

struktur, budaya, dan jaringan sosial. Bukan hanya tentang membangun jalan dan rumah, tetapi juga tentang membangun iman kolektif terhadap masa depan yang lebih adil dan bermartabat.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pengentasan kemiskinan di pedesaan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan struktural semata, tetapi sangat bergantung pada kekuatan budaya dan sosial yang hidup dalam masyarakat lokal. Tiga temuan utama yang dapat dijadikan pembelajaran adalah: (1) kemiskinan bersifat multidimensi dan terhubung erat dengan struktur spasial serta sejarah keterisolasian; (2) rekonstruksi budaya seperti ritual pakanan sahur lewu dan perubahan peran gender menjadi alat penting dalam membangun kohesi sosial pascarelokasi; dan (3) modal sosial dalam bentuk gotong royong, kepercayaan, dan solidaritas lintas agama menjadi pilar kolektif yang memperkuat pembangunan. Hikmah utama dari penelitian ini adalah pentingnya menghargai nilai-nilai lokal dan jaringan sosial dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan dan manusiawi.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pada pemerikayaan wacana pembangunan pedesaan berbasis budaya dan modal sosial dalam kajian sosiologi, antropologi pembangunan, dan studi kemiskinan. Dengan menggabungkan pendekatan struktural (relokasi dan pembangunan infrastruktur) dengan pendekatan kultural (rekonstruksi nilai dan praktik sosial), studi ini memperlihatkan bahwa transformasi sosial yang efektif memerlukan integrasi keduanya. Penelitian ini juga menyumbangkan gagasan konseptual baru dalam kerangka reproduksi identitas sosial, bahwa identitas masyarakat dapat dibentuk ulang melalui krisis, adaptasi, dan negosiasi makna. Dalam konteks ilmu sosial dan humaniora, temuan ini memperkuat posisi metodologi kualitatif sebagai pendekatan yang mampu menangkap kedalaman transformasi sosial dalam konteks lokal.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Fokus kajian yang hanya pada satu masyarakat (Desa Lawang Kajang) dengan jumlah informan terbatas, serta dominasi pada kelompok mayoritas etnis dan gender tertentu, membatasi kemampuan generalisasi terhadap konteks masyarakat lain di Kalimantan Tengah atau Indonesia secara luas. Variasi praktik budaya, struktur sosial, serta relasi kuasa dalam kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas, pemeluk agama minoritas, atau rumah tangga tanpa kepala keluarga laki-laki) belum terakomodasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mampu menjangkau variasi kasus, kelompok sosial, dan konteks geografis yang berbeda, agar diperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam mengenai relasi antara budaya, modal sosial, dan strategi pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.

## 5. REFERENSI

- Abdullah, I. (2002). Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya. *Humaniora*, XIV(3), 260–270.
- Dercon, S. (2009). Rural poverty: Old challenges in new contexts. *World Bank Research Observer*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkp003>
- Edwin, F., Najoran, H., & Kimbal, A. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 di Kota Manado. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–11.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18.
- Fauzi, R. (2015). Analisis Kemiskinan Petani di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Universitas Jember.
- Geertz, C. (1979). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhratara K.A.
- Hall, S. (1991). Cultural Identity and Diaspora. In Jana Evanz Braziel & Anita Mannur (Eds.), *Theorizing Diaspora: a Reader* (pp. 234–246). Blackwell.
- Hall, S. (1996). Introduction: Who Needs “Identity”? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). SAGE Publications. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmka/j/https://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall\\_Who\\_Needs\\_Identity.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmka/j/https://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall_Who_Needs_Identity.pdf)
- Hardinandar, F. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) DETERMINAN KEMISKINAN (STUDI KASUS 29 KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA) DETERMINANTS OF POVERTY (CASE STUDY 29 CITIES / DISTRICT IN PAPUA PROVINCE). *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1). <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Meert, H. (2000). Rural community life and the importance of reciprocal survival strategies. *Sociologia Ruralis*, 40(3), 319–338. <https://doi.org/10.1111/1467-9523.00151>
- Murdiyana, O. :, & Mulyana, D. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Vol. 10, Issue 1). [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/JOD.1995.0002>
- Rahmawati, N. N., Restulita, E. L. S., Adi, A., & Winawati. (2024). Strategi dan Implikasi Pengentasan Kemiskinan Di Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas (Telaah Dimensi Struktural Dan Kultural).
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoderen* (Saut Pasaribu, dkk). Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Alimandan Terj. (7th ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kreasi Wacana.
- Romadlon, B. W. (2021). Analisis Pemikiran Mubyarto: pengentasan Kemiskinan [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35823>
- Santosa, A. (n.d.). WARISAN PEMIKIRAN MUBYARTO: SEBUAH PENGANTAR. Retrieved July 5, 2025, from <https://psp.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/247/2021/09/Warisan-Pemikiran-Mubyarto.pdf>
- Siisiäinen, M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. 1–26. [https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Publication/20652721?auxfun=&lang=en\\_GB](https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Publication/20652721?auxfun=&lang=en_GB)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *JMPK*, 8(3), 121–129.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media.
- Ubur, H. (2011). Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendekatan Proses 9Studi kasus masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 209–224. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/443/340>